

BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

6.1. Strategi

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai dan selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Perumusan strategi membutuhkan kesatuan tujuan untuk mendapatkan kesatuan tindak. Satu strategi dapat terhubung dengan pencapaian satu sasaran. Dalam hal beberapa sasaran bersifat inherent dengan satu tema, Satu strategi dapat dirumuskan untuk mencapai gabungan beberapa sasaran tersebut. Selain itu perumusan strategi juga memperhatikan masalah yang telah dirumuskan pada tahap perumusan masalah. Pernyataan strategi juga dapat mengubah kalimat negatif masalah menjadi kalimat positif untuk dijadikan sebagai strategi. Berdasarkan pemahaman tersebut maka rumusan strategi RPJMD Kabupaten Takalar 2017 - 2022 dapat dirumuskan sebagai berikut.

Strategi -1 : Peningkatan mutu tenaga pendidik dan penempatannya secara merata diseluruh wilayah dengan metode pembelajaran yang ramah anak serta peningkatan sarana dan prasarana pendidikan.

Bahwa pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat oleh karena itu penjaminan mutu pendidikan menjadi tanggung jawab bersama ketiga unsur tersebut. Penjaminan mutu pendidikan perlu terus didorong dengan perangkat peraturan perundang-undangan yang memberikan arah dalam pelaksanaannya. Tujuan akhir penjaminan mutu pendidikan adalah tingginya kecerdasan kehidupan manusia

dan bangsa sebagaimana dicita-citakan oleh Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penjaminan mutu pendidikan menganut paradigma antara lain pendidikan untuk semua yang bersifat inklusif dan tidak mendiskriminasi peserta didik atas dasar latar belakang apapun, pembelajaran sepanjang hayat berpusat pada peserta didik yang memperlakukan, memfasilitasi, dan mendorong peserta didik menjadi insan pembelajar mandiri yang kreatif, inovatif, dan berkewirausahaan, serta pendidikan untuk perkembangan, pengembangan, dan/atau pembangunan berkelanjutan (*education for sustainable development*), yaitu pendidikan yang mampu mengembangkan peserta didik menjadi rahmat bagi sekalian alam.

Oleh karena itu permasalahan pendidikan yang ada di Kabupaten Takalar mungkin juga terjadi di kabupaten lain di Indonesia yaitu kualitas tenaga pengajar dan pendidik yang belum optimal dalam hal pengembangan kompetensinya, penataan gedung sekolah yang belum maksimal sehingga ada sekolah yang kekurangan murid dan disatu sisi ada sekolah yang kelebihan muridnya, angka putus sekolah yang masih tinggi serta sarana dan prasaran belum memadai. Pemerintah Daerah periode 2017 - 2022 mengkonsentrasikan pada peningkatan kualitas murid dan kualitas tenaga pengajar serta pendidiknya.

Strategi - 2 : Peningkatan mutu tenaga kesehatan dan memberdayakan para tenaga kesehatan non PNS secara professional dengan didukung oleh kecukupan sarana dan prasarana kesehatan serta keberpihakan kepada masyarakat kurang mampu.

Kesehatan merupakan kebutuhan dasar setiap manusia dan merupakan modal setiap warga negara dan setiap bangsa dalam mencapai tujuannya dan mencapai kemakmuran. Seseorang tidak bisa memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya jika dia berada dalam kondisi tidak sehat. Sehingga kesehatan

merupakan modal setiap individu untuk meneruskan kehidupannya secara layak.

Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk menjamin setiap warga Negara dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan. Sebagai suatu kebutuhan dasar, setiap individu bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, sehingga pada dasarnya pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap kesehatan adalah tanggung jawab setiap warganegara.

Meskipun upaya untuk memenuhi kebutuhan bidang kesehatan melekat pada setiap warga negara, namun mengingat karakteristik barang/jasa kesehatan tidak dapat diusahakan/diproduksi sendiri secara langsung oleh masing-masing warga negara, melainkan harus ada pihak lain yang secara khusus memproduksi dan menyediakannya, maka penyediaan barang/jasa bidang kesehatan mutlak memerlukan keterlibatan pemerintah untuk :

1. Menjamin tersedianya barang/jasa kesehatan yang dapat diperoleh warga negara yang memerlukan sesuai dengan kebutuhannya;
2. Menyediakan barang/jasa kesehatan bagi warga negara yang tidak mampu memenuhi kebutuhannya di bidang kesehatan.

Untuk memenuhi standar pelayanan minimal bidang kesehatan maka pemerintah Kabupaten Takalar membuat kebijakan dalam bentuk program yaitu peningkatan kualitas pelayanan kesehatan gratis, pembangunan rumah sakit bertaraf internasional, perekrutan tenaga kesehatan profesional dengan ikatan kontrak oleh pemerintah Kabupaten Takalar serta pelayanan kesehatan yang berpihak kepada kaum marginal, kebijakan menempatkan satu tenaga kesehatan disetiap dusun dengan memamkai pendekatan *home Visit*, serta pelayanan pasien berbasis *online*.

Strategi - 3 : Pengembangan kompetensi teknis dan kewirausahaan tenaga kerja, pencari kerja dan wirausahawan.

Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan/keahlian dan sikap kerja yang sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan. Pelatihan berbasis kompetensi adalah pelatihan yang menitikberatkan pada penguasaan kemampuan kerja yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan standar yang ditetapkan dan persyaratan di tempat kerja. Pelatihan berbasis masyarakat adalah pelatihan yang didesain berdasarkan kebutuhan masyarakat dan potensi daerah baik yang mengacu pada standar kompetensi maupun non standar. Pelatihan kewirausahaan adalah pelatihan yang membekali peserta secara bertahap agar memiliki kompetensi kewirausahaan dan bisnis, sehingga mampu menciptakan kesempatan kerja bagi dirinya sendiri maupun orang lain sesuai tuntutan pembangunan.

Pengantar diatas memberikan gambaran bahwa pengembangan kompetensi tenaga kerja sangat dibutuhkan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang siap untuk bersaing antar daerah, nasional maupun internasional. Kebijakan pemerintah periode ini ingin menyediakan 10.000 orang tenaga kerja handal, yang mempunyai etos kerja yang tinggi sehingga berdampak pada menurunnya beban hidup masyarakat menuju pencapaian kesejahteraan hidup masyarakat. Kebijakan pemerintah daerah yang tidak familiar adalah menghentikan perekrutan Tenaga sekarela/honor dan menyeleksi kembali tenaga honor/sukarela yang telah bertugas secara profesional dan dijadikan tenaga non PNS yang professional.

Strategi - 4 : Optimalisasi pengembangan sektor unggulan pertanian, tanaman pangan, peternakan dan perikanan serta perdagangan dan jasa berbasis jaringan dengan Sistem Pertanian Terpadu.

Sistem Pertanian terpadu merupakan sistem yang menggabungkan kegiatan pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan dan ilmu lain yang terkait dengan pertanian dalam satu lahan, sehingga diharapkan menjadi salah satu solusi bagi peningkatan produktivitas lahan, program pembangunan dan konservasi lingkungan, serta pengembangan desa secara terpadu. Diharapkan kebutuhan jangka pendek, menengah, dan panjang petani berupa pangan, sandang dan papan akan tercukupi dengan sistem pertanian ini.

Pertanian terpadu pada hakekatnya adalah memanfaatkan seluruh potensi energi sehingga dapat dipanen secara seimbang. Pertanian melibatkan makhluk hidup dalam satu atau beberapa tahapan dan memerlukan ruang untuk kegiatan serta jangka waktu tertentu dalam proses produksi. Dengan pertanian terpadu ada pengikatan bahan organik di dalam tanah dan penyerapan karbon lebih rendah dibanding pertanian konvensional yang pakai pupuk nitrogen dan sebagainya. Agar proses pemanfaatan tersebut dapat terjadi secara efektif dan efisien, maka sebaiknya produksi pertanian terpadu berada dalam suatu kawasan. Pada kawasan tersebut sebaiknya terdapat sektor produksi tanaman, peternakan maupun perikanan. Keberadaan sektor-sektor ini akan mengakibatkan kawasan tersebut memiliki ekosistem yang lengkap dan seluruh komponen produksi tidak akan menjadi limbah karena pasti akan dimanfaatkan oleh komponen lainnya. Disamping akan terjadi peningkatan hasil produksi dan penekanan biaya produksi sehingga efektivitas dan efisiensi produksi akan tercapai.

Selain hemat energi, keunggulan lain dari pertanian terpadu adalah petani akan memiliki beragam sumber penghasilan. Sistem Pertanian terpadu memperhatikan diversifikasi tanaman dan polikultur. Seorang petani bisa menanam padi dan bisa juga beternak sapi, kambing atau ayam dan menanam jagung serta sayuran. Kotoran yang dihasilkan oleh ternak dapat digunakan sebagai pupuk sehingga petani tidak perlu membeli pupuk lagi. Jika panen

gagal, petani masih bisa mengandalkan daging atau telur ayam, atau bahkan menjual sapi atau kambing untuk mendapatkan penghasilan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar menjadikan Sistem Pertanian Terpadu sebagai wujud nyata dari janji politik yang menjadi program prioritas daerah. Bantuan sapi berkelompok tani, pemanfaatan kotoran sapi melalui teknologi terapan dan pengadaan pakan ternak dengan menggunakan ampas tebu, pengadaan biogas dengan menggunakan kotoran sapi, sampai kepada pembuatan pupuk organik yang nantinya akan dikelola oleh Perusahaan Daerah dan akan menambah pendapatan para petani. Penangkaran bibit tanaman khususnya jagung serta budidaya perikanan tangkap dan pengolahan rumput laut mewarnai system pertanian yang terpadu dengan berkonsentrasi di beberapa kecamatan. Lebih jauh perencanaan terkait pemanfaatan system pertanian terpadu akan dijadikan sebagai bentuk "Inovasi Daerah" dalam mendukung program pemanfaatan sumber daya alam berkelanjutan atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Pemerintah Daerah berharap kepada semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait merapatkan barisan untuk sama-sama memaksimalkan dan mengembangkan kawasan pertanian terpadu, untuk ketahanan pangan dan pembangunan berkelanjutan ke depan.

Strategi - 5 : Penajaman target penerima manfaat dalam gerakan penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan secara terpadu.

Fenomena kemiskinan dan ketimpangan di Negara - negara berkembang (*developing countries*), termasuk Indonesia, sejak lama telah menjadi pusat perhatian para ahli ekonomi dan sosial. Perhatian tersebut menjadi kian intensif setelah ditemukannya fakta bahwa diberbagai belahan dunia, sejumlah Negara telah mencatat laju pertumbuhan ekonomi yang mengesankan dan bahkan berlangsung secara konsisten selama satu atau dua dekade, akan tetapi, pertumbuhan tersebut ternyata tidak serta merta mereduksi angka kemiskinan.

Secara umum, kelemahan utama penanggulangan kemiskinan pada masa lalu yang perlu dikoreksi secara mendasar, antara lain: masih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi makro, kebijakan yang terpusat, lebih bersifat karikatif, bernuansa jangka pendek dan tidak bersifat struktural, memposisikan masyarakat sebagai obyek, cara pandang tentang kemiskinan yang diorientasikan pada ekonomi, dan asumsi permasalahan dan penanggulangan kemiskinan yang sering dipandang sama.

Kebijakan pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan dengan adanya program yang sudah familiar adalah bantuan rumah tidak layak huni yang akan ditingkatkan pemanfaatnya melalui kerjasama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta kerjasama dengan pemerintah desa, bantuan nikah gratis serta bebas uang tunggakan Pajak Bumi Bangunan (PBB), bantuan akses keuangan kepada Usaha Kecil Menengah melalui bank - bank dan non bank, serta bantuan tanpa uang melalui peralatan - peralatan serta sarana dan prasarana usaha.

Strategi - 6 : Menciptakan iklim investasi yang sehat dan berkualitas melalui promosi - promosi kekayaan sumber daya alam sebagai bentuk pariwisata berkelanjutan, kebudayaan lokal serta penyiapan prasarana investasi melalui jaringan multipihak.

Pariwisata berkelanjutan adalah pariwisata yang mengundang semua pihak - terutama anggota masyarakat - untuk mengelola sumber daya dengan cara yang memenuhi kebutuhan ekonomi, sosial, dan estetika sambil memastikan keberlanjutan budaya lokal, habitat alam, keanekaragaman hayati, dan sistem pendukung penting lainnya. Takalar kaya akan sumber daya alam yang indah mulai dari pantai, pegunungan dan pulauanya, serta kebudayaan dan tempat - tempat bersejarah. diperlukan penanganan yang serius untuk mempromosikan kekayaan tersebut dengan berbasis jaringan dan investor dalam dan luar negeri.

Konsep pariwisata yang diusung oleh pemerintah daerah adalah membuat destinasi – destinasi wisata mulai dari barat sampai timur Takalar. Peninggalan – peninggalan bersejarah berupa situs diantaranya adalah Kota Pemerintahan yang pernah diduduki oleh Belanda yang terletak di Kelurahan Takalar Kecamatan Mappakasunggu, Perairan Galesong yang pernah menjadi tempat berlabuhnya tentara Sultan Hasanuddin, Benteng Sanrobone yang lahir pada abad XV dari buah tangan Raja Sanrobone I Karaeng Dampang Panca Belong, dan sejarah Kerajaan Laikang serta Kerajaan Polongbangkeng.

Wisata kuliner termasuk program prioritas pemerintah daerah yang menjadi peluang cukup besar diantaranya wisata kuliner ikan segar, kuliner jagung manis yang akan ditata kembali sarana dan prasarannya. “Wisata Berburu” di Kecamatan Polongbangkeng Utara dan Polongbangkeng Selatan yang akan diintegrasikan dengan wisata kebun dan buah. Bendungan Pammukulu selain berfungsi sebagai irigasi dapat juga diubah menjadi destinasi wisata dengan objeknya adalah danau.

Strategi - 7 : Mengintegrasikan perencanaan pembangunan infrastruktur kabupaten sampai ke tingkat desa berlandaskan kekuatan yang ada di desa serta meningkatkan kemandirian desa secara berkelanjutan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.11/PRT/M/2012, yang dimaksud dengan infrastruktur mencakup bidang sumberdaya air, jalan dan jembatan, perumahan dan permukiman, dan penataan ruang. Program pemerintah saat ini, mendorong pembangunan jaringan infrastruktur jembatan laut, dan sistem logistik harus terintegrasi satu sama lain agar dapat memberikan manfaat nyata terhadap aspek ekonomi, serta mampu meningkatkan arus masuk/keluar barang dan jasa antar kota, antar kabupaten, antar provinsi, antar pulau, dan antar wilayah. Penerapan rencana aksi tentang isu berkelanjutan dapat dimulai di

tingkat kota atau dapat dilakukan secara simultan di tingkat kabupaten dan provinsi.

Konsep pembangunan berkelanjutan mencakup tiga pilar yang saling terkait satu sama lain dan saling menunjang yakni pembangunan ekonomi, pembangunan sosial dan pelestarian lingkungan hidup (KTT Bumi,1992). Definisi lain dari pembangunan berkelanjutan adalah (1) Pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat; (2) Pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat dan (3) Pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup masyarakat yang didukung oleh tata kelola yang menjaga pelaksanaan pembangunan yang akan meningkatkan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. (RPJMN Tahun 2015-2019).

Di Indonesia dikenal dengan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan (PBBL), yang didefinisikan sebagai pembangunan untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhinya. Salah satu derivatif PBBL adalah dokumen konstruksi Indonesia 2030 yang memiliki salah satu visi "Kenyamanan Lingkungan Terbangun" dan salah satu misinya adalah "Menjamin Keberlanjutan". Sedangkan tujuan konstruksi Indonesia diantaranya adalah "Peningkatan Keberlanjutan" dan "Produk Konstruksi Berkelanjutan".

Saat ini Indonesia telah memasuki tahap III (2016-2020) dalam Agenda Konstruksi Indonesia 2010-2030 dengan agenda "Memacu Pertumbuhan Sektor Konstruksi" yang terdiri dari 16 agenda, salah satu diantaranya adalah "Perencanaan Infrastruktur Terintegrasi".

Untuk mencapai sarana transportasi yang terhubung dan terintegrasi secara nasional diperlukan konsep yang jelas dan tentu membutuhkan biaya pembangunan infrastruktur yang relatif besar. Melalui kebijakan otonomi daerah, pembangunan sarana infrastruktur bukan hanya

merupakan tanggung jawab Pemerintah Pusat, akan tetapi menjadi bagian dari kewajiban Pemerintah Daerah.

Salah satu pendekatan untuk mengoptimalkan kinerja sebuah kota perlu diperhatikan ketersediaan infrastruktur, tidak hanya dalam hal kapasitasnya saja namun harus mempertimbangkan aspek integrasi antar jenis infrastruktur. Hal ini dibuktikan oleh Legowo, P. S., 2009 bahwa ada pengaruh signifikan antara investasi infrastruktur jaringan jalan di satu wilayah terhadap aktivitas ekonomi (sektoral) di wilayah tersebut dan wilayah sekitarnya.

Perencanaan pemerintah daerah terkait dengan infrastruktur terintegrasi dan berkelanjutan adalah konsep "*one hour around Takalar*" satu jam berkeliling takalar dengan membuat infrastruktur jalan jembatan dengan system "*Lingkar barat sampai Lingkar Timur*" mulai dari Kecamatan galesong Utara sampai kepada Kecamatan Polombangkeng Utara dengan melewati banyak destinasi wisata yang telah dirancang sedemikian rupa sehingga dapat mendatangkan devisa daerah. Lingkar Timur yang langsung menghubungkan Kabupaten Takalar dengan Kabupaten Gowa dan Lingkar Barat yang menghubungkan langsung Takalar dengan Kota Makassar. Dengan konsep *one hour around Takalar* diharapkan mampu menyerap orang - orang untuk datang ke Takalar menikmati keindahan alamnya sepanjang jalan sehingga mampu merealisasikan strategi "*something to see, something to do, something to buy*", setiap orang yang datang akan melihat, melakukan dan membeli sesuatu yang bermanfaat.

Strategi - 8 : Membangun akhlak bersendikan agama sejak dini melalui aktivitas keagamaan dan memberikan apresiasi kepada imam desa, imam dusun dan tokoh agama yang berprestasi.

Pendidikan anak usia dini adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang

ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal.

Pendidikan anak usia dini merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menitikberatkan pada peletakan dasar ke arah pertumbuhan dan 6 (enam) perkembangan: agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial-emosional, dan seni, sesuai dengan keunikan dan tahap-tahap perkembangan sesuai kelompok usia yang dilalui oleh anak usia dini. Usia dini yang dikenal juga dengan "*Golden Age*", mendidik anak dengan bekal nilai - nilai luhur dimasa ini akan memberikan dampak yang kuat bagi kehidupan pada masa dewasa.

Program prioritas pemerintah kabupaten Takalar meletakkan sendi - sendi agama sejak usia dini melalui kegiatan keagamaan diantaranya gerakan shalat berjamaah, hafidz Qur'an serta kegiatan keagamaan lainnya. Pemberian apresiasi kepada para tokoh agama yang berprestasi berupa insentif dan umrah.

Strategi - 9 : Penegakan kedisiplinan seluruh aparat sipil Negara dengan payung hukum reformasi birokrasi dan meningkatkan kinerja dan pengawasan serta pemberian pengakuan terhadap kinerja penata kelolaan pemerintahan daerah dan desa.

Dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dibangun aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelaksanaan manajemen aparatur sipil negara belum berdasarkan pada perbandingan antara kompetensi dan kualifikasi yang diperlukan oleh jabatan dengan kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki calon dalam rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi pada jabatan sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Untuk mewujudkan aparatur sipil Negara sebagai bagian dari reformasi birokrasi, perlu ditetapkan aparatur sipil negara sebagai profesi yang memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya dan wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya dan menerapkan prinsip merit dalam pelaksanaan manajemen aparatur sipil Negara.

ASN sebagai profesi berlandaskan pada prinsip sebagai berikut:

- a. Nilai dasar;
- b. Kode etik dan kode perilaku;
- c. Komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik;
- d. Kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas;
- e. Kualifikasi akademik;
- f. Jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas; dan
- g. Profesionalitas jabatan.

Penjabaran salah satu misi pemerintah daerah “menerapkan tatakelola pemerintahan yang efektif, bersih, akuntabel dan demokratis” dijabarkan dalam program prioritas adalah bagaimana menciptakan pemerintahan yang *good governance* melalui program peningkatan kesejahteraan aparatur sipil Negara, meminimalisir temuan atas kesalahan administrasi terkait keuangan dan laporan kinerja, serta memperkuat dan meningkatkan bentuk pelayanan kepada publik dengan jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun;

Visi, Misi, Tujuan. Sasaran dan Strategi Kabupaten Takalar 2017 - 2022

Visi : Terwujudnya Kabupaten Takalar yang Unggul Sejahtera dan Bermartabat

No	Tujuan	Sasaran	Strategis
	Misi - 1: Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan produktivitas masyarakat yang berdaya saing tinggi		
	T1. Meningkatkan derajat pendidikan, derajat kesehatan dan produktivitas masyarakat	S1.1 meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	Peningkatan mutu tenaga pendidik dan penempatannya secara merata diseluruh wilayah dengan metode pembelajaran yang ramah anak serta peningkatan sarana dan prasarana.
		S1.2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Peningkatan mutu tenaga kesehatan dan memberdayakan para tenaga kesehatan non PNS secara professional dengan didukung oleh kecukupan sarana dan prasarana kesehatan.
		S1.3 Meningkatnya produktivitas SDM masyarakat	Pengembangan kompetensi teknis dan kewirausahaan tenaga kerja, pencari kerja dan wirausahawan.
	Misi - 2 Meningkatkan pendapatan dan meringankan beban hidup masyarakat		
	T.2 Meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat	S2.1 Meningkatnya produksi dan produktivitas sektor - sektor perkenomian daerah	Optimalisasi pengembangan sektor unggulan pertanian, tanaman pangan, peternakan dan perikanan serta perdagangan dan jasa berbasis jaringan.
		S2.2 Berkurangnya beban hidup masyarakat lapis bawah	Penajaman target penerima manfaat dalam gerakan penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan secara terpadu.
	Misi 3 : Mewujudkan iklim investasi yang sehat, dan berkelanjutan		
	T.3 Meningkatkan kapasitas investasi dan kerjasama pembangunan	S3.1 Meningkatnya realisasi investasi dan kerjasama pembangunan daerah	Menciptakan iklim investasi yang sehat dan berkualitas melalui promosi - promosi kekayaan sumber daya alam, kebudayaan local serta penyiapan prasarana investasi melalui jaringan multipihak.
	Misi-4 : Mewujudkan pembangunan yang komprehensif berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang berbasis pada desa		
	T.4 Memelihara daya dukung lingkungan bagi keberlanjutan pembangunan serta penguatan desa	S4.1 Terpeliharanya daya dukung lingkungan dan sumber daya alam berbasis integrasi ruang	Mengintegrasikan perencanaan pembangunan infrastruktur kabupaten sampai ke tingkat desa berlandaskan kekuatan yang ada di desa serta meningkatkan kemandirian desa secara berkelanjutan
		S4.2 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat	

		dan pembinaan kemasyarakatan di desa	
	T5. Meningkatkan kapasitas infrastruktur wilayah secara berkelanjutan	S5.1 Meningkatnya kapasitas infrastruktur transportasi	
		S5.2 Meningkatnya kapasitas infrastruktur permukiman dan perumahan	
Misi - 5 : Mewujudkan kehidupan yang agamis, demokratis, aman dan tertib			
	T6 Meningkatkan martabat tatanan sosial kemasyarakatan	S6.1 Meningkatnya kualitas kehidupan keagamaan	Membangun akhlak bersendikan agama sejak dini melalui aktivitas keagamaan dan memberikan apresiasi terhadap para tokoh agama yang amanah.
		S6.2 Meningkatnya kualitas ketertiban, ketentraman dan perlindungan masyarakat	
Misi - 6 : Menerapkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, akuntabel dan demokratis			
	T.7 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik untuk pelayanan public yang berkualitas	S7.1 Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, akuntabel dan demokratis.	Penegakan kedisiplinan seluruh aparat sipil Negara dengan payung hukum reformasi birokrasi dan meningkatkan kinerja dan pengawasan serta pemberian pengakuan terhadap kinerja penata kelolaan pemerintahan daerah dan desa.
		S7.2 Meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan public.	

6.2. Arah Kebijakan

Menurut Permendagri 86/2017, arah kebijakan dalam RPJMD adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Penekanan prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi memiliki kesinambungan dari satu tahun ke tahun berikutnya dalam rangka mencapai sasaran pembangunan Daerah. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan prioritas yang berada setiap tahun bukan berarti bahwa Program/kegiatan pembangunan operasional pada SKPD diluar yang diprioritaskan tidak berjalan, tetapi berjalan dengan penekanan strategis yang lebih rendah dibanding yang diprioritaskan.

Berdasarkan pemahaman demikian maka arah kebijakan pembangunan Kabupaten Takalar selama periode 2017 - 2022 dapat diuraikan sebagai berikut:

(1) Arah kebijakan pembangunan tahun 2018

Arah kebijakan pemerintah di tahun 2018 adalah :

1. Penuntasan wajib belajar sembilan tahun melalui “Gerakan Kembali Bersekolah”
2. Pemerataan dan peningkatan kualitas guru
3. Peningkatan fasilitas sarana dan prasarana pendidikan
4. Penuntasan buta aksara
5. Keterpaduan penanganan infrastruktur perumahan pemukiman yang berkelanjutan
6. Peningkatan produksi di sektor pertanian, perikanan dan peternakan
7. Pengembangan kawasan perikanan dan peningkatan sarana dan prasarana hasil perikanan yang berkualitas dan berdaya saing
8. Pengembangan sektor pariwisata
9. Persiapan pembangunan sarana rumah sakit bertaraf internasional
10. Penyusunan regulasi terkait peningkatan kualitas hidup beragama

11. Peningkatan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen bagi usaha kecil mikro dan menengah
12. Regulasi terkait ketenagakerjaan
13. Penataan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil untuk mewujudkan peningkatan capaian pelayanan KK, KTP dan Akte Kelahiran bagi seluruh penduduk.

(2) Arah kebijakan pembangunan tahun 2019

1. Peningkatan kualitas guru
2. Penuntasan wajib belajar sembilan tahun melalui gerakan “Kembali Bersekolah”
3. Pemerataan dan peningkatan kualitas guru
4. Peningkatan fasilitas sarana dan prasarana pendidikan
5. Penuntasan buta aksara
6. Pengembangan sektor pariwisata
7. Peningkatan produksi di sektor pertanian, perikanan dan peternakan
8. Ketrapduan penanganan infrastruktur perumahan pemukiman yang berkelanjutan
9. Peningkatan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen bagi usaha kecil mikro dan menengah
10. Menciptakan tenaga kerja yang berkualitas dan berdaya saing tinggi
11. Penataan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil untuk mewujudkan peningkatan capaian pelayanan KK, KTP dan Akte Kelahiran bagi seluruh penduduk.
12. Pengembangan kawasan perikanan dan peningkatan sarana dan prasarana hasil perikanan yang berkualitas dan berdaya saing
13. Peningkatan kualitas kehidupan keagamaan

(3) Arah kebijakan pembangunan tahun 2020

1. Peningkatan kualitas guru

2. Penuntasan wajib belajar sembilan tahun melalui gerakan “Kembali Bersekolah”
 3. Pemerataan dan peningkatan kualitas guru
 4. Peningkatan fasilitas sarana dan prasarana pendidikan
 5. Penuntasan buta aksara
 6. Mendorong penerapan standarisasi dalam proses produksi dan pengolahan
 7. Penciptaan lapangan kerja dan usaha
 8. Ketrapduan penanganan infrastruktur perumahan pemukiman yang berkelanjutan
 9. Penataan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil untuk mewujudkan peningkatan capaian pelayanan KK, KTP dan Akte Kelahiran bagi seluruh penduduk.
 10. Pengembangan kawasan perikanan dan peningkatan sarana dan prasarana hasil perikanan yang berkualitas dan berdaya saing
 11. Peningkatan kualitas kehidupan keagamaan
- (4) Arah kebijakan pembangunan tahun 2021
1. Peningkatan kualitas guru
 2. Penuntasan wajib belajar sembilan tahun melalui gerakan “Kembali Bersekolah”
 3. Pemerataan dan peningkatan kualitas guru
 4. Peningkatan fasilitas sarana dan prasarana pendidikan
 5. Peningkatan kemampuan rancang bangun dan perekayasaan bagi usaha menengah
 6. Mendorong terbentuknya struktur pasar yang menjamin tumbuhnya persaingan usaha yang sehat dan melindungi konsumen
 7. Pengembangan potensi industry rumah tangga, industry kecil dan menengah
 8. Penempatan dan perluasan kesempatan tenaga kerja

9. Ketrpaduan penanganan infrastruktur perumahan pemukiman yang berkelanjutan
 10. Pengembangan kawasan perikanan dan peningkatan sarana dan prasarana hasil perikanan yang berkualitas dan berdaya saing
 11. Peningkatan kualitas kehidupan keagamaan
- (5) Arah kebijakan pembangunan tahun 2022
1. Peningkatan kualitas guru
 2. Penuntasan wajib belajar sembilan tahun melalui gerakan “Kembali Bersekolah”
 3. Pemerataan dan peningkatan kualitas guru
 4. Peningkatan fasilitas sarana dan prasarana pendidikan
 5. Ketrpaduan penanganan infrastruktur perumahan pemukiman yang berkelanjutan
 6. Mengembangkan lembaga pendidikan, pelatihan penyuluhan, motivasi dan kreatifitas bisnis dan penetapan wirausaha baru.
 7. Mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan / kelompok tertentu yang merugikan UMKM.
 8. Pengolahan hasil industri rumah tangga, industri kecil dan menengah
 9. Pembinaan tenaga kerja
 10. Penataan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil untuk mewujudkan peningkatan capaian pelayanan KK, KTP dan Akte Kelahiran bagi seluruh penduduk.
 11. Pengembangan kawasan perikanan dan peningkatan sarana dan prasarana hasil perikanan yang berkualitas dan berdaya saing
 12. Peningkatan kualitas kehidupan keagamaan

Uraian arah kebijakan bila dihubungkan dengan masing - masing tujuan dan sasaran serta misi yang dikontribusinya maka dapat dilihat sebagai berikut :

Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Takalar Tahun 2017 – 2022

Arah Kebijakan				
Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
<p>Tema : Percepatan pemerataan pembangunan untuk mewujudkan takalar yang unggul dan bermartabat</p> <p>Arah Kebijakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menuju Takalar cerdas, jujur, aman, bersih dan indah (Gema Tasamara) 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia 	<p>Tema : Peningkatan kualitas pelayanan pembangunan menuju takalar yang unggul dan sejahtera</p> <p>Arah Kebijakan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat 2. Peningkatan produktivitas dan produksi, pertanian, perikanan dan pariwisata. 3. Pengembangan infrastruktur, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat 4. Akselerasi pemberdayaan masyarakat dan penguatan kemandirian desa 5. Peningkatan kualitas keagamaan 6. Reformasi Birokrasi dan Penguatan Kapasitas Kelembagaan 	<p>Tema : Akselerasi kualitas sumber daya manusia untuk mewujudkan takalar yang unggul, sejahtera dan bermartabat</p> <p>Arah Kebijakan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat 2. Peningkatan produktivitas dan produksi, pertanian, perikanan dan pariwisata. 3. Pengembangan infrastruktur, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat 4. Akselerasi pemberdayaan masyarakat dan penguatan kemandirian desa 5. Peningkatan kualitas keagamaan 6. Reformasi Birokrasi dan Penguatan Kapasitas Kelembagaan 	<p>Tema : Pengembangan kreatifitas sumber daya manusia menuju takalar yang unggul dan bermartabat</p> <p>Arah Kebijakan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia berlandaskan iman dan taqwa 2. Peningkatan produktivitas dan produksi, pertanian, perikanan dan pariwisata. 3. Pengembangan infrastruktur, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat 4. Akselerasi pemberdayaan masyarakat dan penguatan kemandirian desa 5. Peningkatan kualitas keagamaan 6. Reformasi Birokrasi dan Penguatan Kapasitas Kelembagaan 	<p>Tema : Pemerataan pembangunan disegala sektor untuk mewujudkan takalar yang unggul, sejahtera dan bermartabat</p> <p>Arah Kebijakan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan Takalar unggul sejahtera dan bermartabat 2. Peningkatan produktivitas dan produksi, pertanian, perikanan dan pariwisata. 3. Pengembangan infrastruktur, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat 4. Akselerasi pemberdayaan masyarakat dan penguatan kemandirian desa 5. Peningkatan kualitas keagamaan 6. Reformasi Birokrasi dan Penguatan Kapasitas Kelembagaan

Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Takalar 2017 - 2022

Visi : Terwujudnya Kabupaten Takalar yang Unggul Sejahtera dan Bermartabat

No	Tujuan	Sasaran	Strategis	Arah Kebijakan				
				2018	2019	2020	2021	2022
Misi - 1: Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan produktivitas masyarakat yang berdaya saing tinggi								
	T1. Meningkatkan derajat pendidikan, derajat kesehatan dan produktivitas masyarakat	S1.1 meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	Peningkatan mutu tenaga pendidik dan penempatannya secara merata diseluruh wilayah dengan metode pembelajaran yang ramah anak serta peningkatan sarana dan prasarana.	Menuju Takalar cerdas, jujur, aman, bersih dan indah (Gema Tasamara)	Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat	Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia berlandaskan iman dan taqwa	Mewujudkan Takalar unggul sejahtera dan bermartabat
		S1.2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Peningkatan mutu tenaga kesehatan dan memberdayakan para tenaga kesehatan non PNS secara professional dengan didukung oleh kecukupan sarana dan prasarana kesehatan.					
		S1.3 Meningkatnya produktivitas SDM masyarakat	Pengembangan kompetensi teknis dan kewirausahaan tenaga kerja, pencari kerja dan wirausahawan.					
Misi - 2 Meningkatkan pendapatan dan meringankan beban hidup masyarakat								
	T.2 Meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat	S2.1 Meningkatnya produksi dan produktivitas sektor - sektor perekonomian daerah	Optimalisasi pengembangan sektor unggulan pertanian, tanaman pangan, peternakan dan perikanan serta perdagangan dan jasa berbasis jaringan.		Peningkatan produktivitas dan produksi, pertanian, perikanan dan pariwisata.	Peningkatan produktivitas dan produksi, pertanian, perikanan dan pariwisata.	Peningkatan produktivitas dan produksi, pertanian, perikanan dan pariwisata.	Peningkatan produktivitas dan produksi, pertanian, perikanan dan pariwisata.

		S2.2 Berkurangnya beban hidup masyarakat lapis bawah	Penajaman target penerima manfaat dalam gerakan penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan secara terpadu.					
Misi 3 : Mewujudkan iklim investasi yang sehat, dan berkelanjutan								
	T.3 Meningkatkan kapasitas investasi dan kerjasama pembangunan	S3.1 Meningkatnya realisasi investasi dan kerjasama pembangunan daerah	Menciptakan iklim investasi yang sehat dan berkualitas melalui promosi - promosi kekayaan sumber daya alam, kebudayaan local serta penyiapan prasarana investasi melalui jaringan multipihak.		Pengembangan infrastruktur, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat	Pengembangan infrastruktur, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat	Pengembangan infrastruktur, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat	Pengembangan infrastruktur, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat
Misi-4 : Mewujudkan pembangunan yang komprehensif berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang berbasis pada desa								
	T.4 Memelihara daya dukung lingkungan bagi keberlanjutan pembangunan serta penguatan desa	S4.1 Terpeliharanya daya dukung lingkungan dan sumber daya alam berbasis integrasi ruang	Mengintegrasikan perencanaan pembangunan infrastruktur kabupaten sampai ke tingkat desa berlandaskan kekuatan yang ada di desa serta meningkatkan kemandirian desa secara berkelanjutan		Akselerasi pemberdayaan masyarakat dan penguatan kemandirian desa	Akselerasi pemberdayaan masyarakat dan penguatan kemandirian desa	Akselerasi pemberdayaan masyarakat dan penguatan kemandirian desa	Akselerasi pemberdayaan masyarakat dan penguatan kemandirian desa
		S4.2 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan di desa						

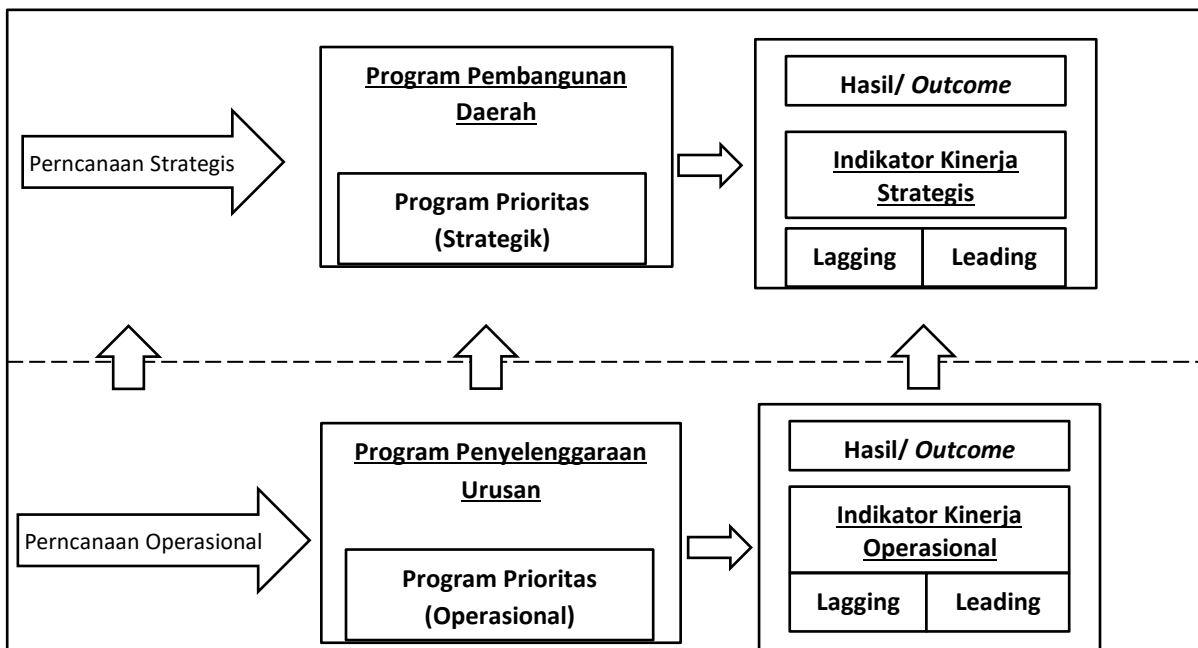
	T5. Meningkatkan kapasitas infrastruktur wilayah secara berkelanjutan	S5.1 Meningkatnya kapasitas infrastruktur transportasi						
		S5.2 Meningkatnya kapasitas infrastruktur permukiman dan perumahan						
Misi - 5 : Mewujudkan kehidupan yang agamis, demokratis, aman dan tertib								
	T6 Meningkatkan martabat tatanan sosial kemasyarakatan	S6.1 Meningkatnya kualitas kehidupan keagamaan	Membangun akhlak bersendikan agama sejak dini melalui aktivitas keagamaan dan memberikan apresiasi terhadap para tokoh agama yang amanah.		Peningkatan kualitas keagamaan	Peningkatan kualitas keagamaan	Peningkatan kualitas keagamaan	Peningkatan kualitas keagamaan
		S6.2 Meningkatnya kualitas ketertiban, ketentraman dan perlindungan masyarakat						
Misi - 6 : Menerapkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, akuntabel dan demokratis								
	T.7 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik untuk pelayanan public yang berkualitas	S7.1 Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, akuntabel dan demokratis.	Penegakan kedisiplinan seluruh aparat sipil Negara dengan payung hukum reformasi birokrasi dan meningkatkan kinerja dan pengawasan serta pemberian pengakuan terhadap kinerja penata kelolaan pemerintahan daerah dan desa.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Reformasi Birokrasi dan Penguatan Kapasitas Kelembagaan	Reformasi Birokrasi dan Penguatan Kapasitas Kelembagaan	Reformasi Birokrasi dan Penguatan Kapasitas Kelembagaan	Reformasi Birokrasi dan Penguatan Kapasitas Kelembagaan
		S7.2 Meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan public.						

6.3. Program Pembangunan Daerah

Perumusan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan. Suatu program pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Dalam RPJMD ini, program pembangunan daerah diprioritaskan karena posisinya yang strategis dalam mencapai tujuan dan sasaran. Dalam arsitektur kinerja RPJMD antara yang strategis dengan penyelenggaraan urusan dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 6.2

Arsitektur Kinerja RPJMD antara Kinerja Strategis dengan Operasional.



Berdasarkan pemahaman itu maka rumusan program pembangunan daerah Kabupaten Takalar Tahun 2017 - 2022 sebagai berikut:

1. Bantuan ternak sapi per KK petani
2. Bantuan minimal 1.000 traktor dan 5.000 pompa air dan bibit tanaman produktif
3. Penangkaran benih padi setiap kecamatan dan perbaikan irigasi
4. Bantuan sarana dan prasarana nelayan dan budidaya rumput laut
5. Pengembangan kawasan kuliner ikan segar
6. Penuntasan perbaikan infrastruktur jalan kabupaten
7. Umrah bagi imam desa, imam dusun dan imam masjid
8. Bantuan biaya nikah bagi keluarga kurang mampu
9. Peningkatan insentif pembinaan TK/TPA dan pemberian insentif pegawai sara'
10. Optimalisasi peran gelar pahlawan Nasional Karaeng Galesong
11. Peningkatan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tenaga teknis kebersihan
12. Pembangunan rumah sakit bertaraf internasional
13. Peningkatan kualitas layanan kesehatan gratis
14. Peningkatan kualitas pendidikan gratis dan beasiswa bagi pelajar/mahasiswa berprestasi.
15. Penyediaan mobil keliling layanan KTP/KK
16. Pengadaan mobil pemadam kebakaran setiap kecamatan
17. Gratis untuk beras miskin
18. Gratis biaya tunggakan pajak PBB
19. Bantuan permodalan usaha UMKM
20. Peningkatan tunjangan kepala desa dan perangkat desa
21. Bantuan perbaikan rumah tidak layak huni
22. Membuka 10.000 lapangan kerja baru.

Uraian Program Pemerintah Kabupaten dapat dilihat pada Tabel 6.2. pada tabel tersebut diperlihatkan program pembangunan daerah apa saja yang akan berkontribusi sasaran dan tujuan pada masing - masing misi yang relevan.

Tabel 6.3

**PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH YANG DISERTAI PAGU INDIKATIF
KABUPATEN TAKALAR**

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Impact, Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangk at Daerah Penang gung Jawab
				Tahun - 2018		Tahun - 2019		Tahun - 2020		Tahun - 2021		Tahun - 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	M1 : Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan produktivitas masyarakat yang berdaya saing tinggi															
	T1. Meningkatkan derajat pendidikan, derajat kesehatan dan produktivitas masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia	64.96 (2016)	66		67		68		69		70,24		Urutan ke 18 di Prov. Sulsel		Lintas SKPD/ Sektor
	S1.1. Meningkatkan derajat pendidikan masyarakat	Angka rata - rata lama sekolah	65%	70%		75%		80%		85%		90%		90%		Disdik dan Lintas SKPD
	P1.1.1 Program Pendidikan Anak Usia Dini	APM PAUD	50%	55%	100.000.000	60%	150.000.000	65%	200.000.000	70%	150.000.000	75%	200.000.000	75%	800.000.000	Disdik
		APK PAUD	50%	55%	100.000.000	60%	150.000.000	65%	200.000.000	70%	150.000.000	75%	200.000.000	75%	800.000.000	Disdik
	P1.1.2 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	APM SD	99%	99%	7.911.678.000	100%	7.911.678.000	100%	7.911.678.000	100%	7.911.678.000	100%	7.911.678.000	100%	39.558.390.000	Disdik
		APM SMP	71%	75%	7.911.678.000	80%	7.911.678.000	85%	7.911.678.000	90%	7.911.678.000	95%	7.911.678.000	95%	39.558.390.000	Disdik
		APS SD	90%	92%	150.000.000	94%	150.000.000	96%	150.000.000	98%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	750.000.000	Disdik
		APS SMP	90%	92%	150.000.000	94%	150.000.000	96%	150.000.000	98%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	750.000.000	Disdik

						0		0										
			APK SD	98%	98%	150.000.000	98%	150.000.000	98%	150.000.000	99%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	750.000.000	Disdik	
			APK SMP	98%	98%	150.000.000	98%	150.000.000	98%	150.000.000	99%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	750.000.000	Disdik	
		P1.1.3. Program Pendidikan Non Formal	Angka buta huruf yang tertangani	12,77%	55%	75.000.000	60%	75.000.000	70%	75.000.000	80%	75.000.000	90%	75.000.000	90%	375.000.000	Disdik	
		P1.1.4. Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	95%	96%	75.000.000	97%	75.000.000	98%	75.000.000	99%	75.000.000	100%	75.000.000	100%	375.000.000	Disdik	
		P1.1.5. Program manajemen pelayanan pendidikan	Persentase sekolah yang mempunyai pelayanan pendidikan sesuai standar	14%	24%	75.000.000	34%	75.000.000	44%	75.000.000	54%	75.000.000	64%	75.000.000	64%	375.000.000	Disdik	
		P1.1.6. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian	Persentase sekolah yang bersistem pengawsan yang baik	45%	55%	75.000.000	60%	75.000.000	70%	75.000.000	80%	75.000.000	90%	75.000.000	90%	375.000.000	Disdik	
		P1.1.7. Program Optimalisasi peran gelar pahlawan nasional Karaeng Galesong	Jumlah pengusulan penganugerahan Karaeng Galesong (paket)	Data belum tersedia	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	5	1.250.000.000	Dinas Sosial	
		S1.2 Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Angka harapan hidup	69,80	69,90		70		70,20		70,30		70,40		70,40		Dinas Kesehatan	

		P1.2.13. Program pengadaan peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit bertaraf internasional	Tersedianya rumah sakit yang bertaraf internasional	0	0	0	50%	100.000.000	75%	35.000.000.000	90%	35.000.000.000	100%	30.000.000.000	100%	100.100.000.000	Dinas Kesehatan
		P1.2.14. Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Pembebasan lahan (ha)	0	3	15.000.000.000	2	10.000.000.000	0	0	0	0	0	0	5	25.000.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
		P1.2.15. Program upaya kesehatan masyarakat (JKN)	Persentase penduduk miskin yang terlayani	67%	100%	513.000.000	100%	513.000.000	100%	513.000.000	100%	513.000.000	100%	513.000.000	100%	2.565.000.000	Dinas Kesehatan
		P1.2.16. Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Persentase masyarakat miskin yang mendapat pelayanan sesuai dengan standar	96,29%	97%	19.772.364.000	97,5%	20.000.000.000	98%	21.000.000.000	99%	22.000.000.000	100%	2.300.000.000	100%	85.072.364.000	Dinas Kesehatan
		P1.2.17. Program obat dan perbekalan kesehatan	Kecukupan obat dan perbekalan kesehatan	100%	100%	7.989.084.000	100%	8.363.264.000	100%	8.738.280.000	100%	9.084.000.000	100%	9.429.720.000	100%	43.604.348.000	Dinas Kesehatan
		P1.2.18. Program Layanan home care 24 jam (RSUD)	Persentase jumlah keluarga yang dilayani	0	30%	450.000.000	45%	150.000.000	60%	150.000.000	80%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	1.150.000.000	Dinas Kesehatan
		P1.2.19. Peningkatan kapasitas puskesmas (AKREDITASI) (dasar, madya, utama dan paripurna)	Jumlah puskesmas yang memenuhi standar berkualitas (dasar, madya, utama	Dasar = 4, madya = 4	Dasar = 4, madya = 4	1.000.000.000	Dasar = 7, madya = 2 utama = 1	1.500.000.000	Utama = 3, madya = 2	1.250.000.000	Madya = 4	1.000.000.000	Utama = 2, madya = 4	1.500.000.000	Dasar = 11, madya = 16 utama = 6	6.250.000.000	Dinas Kesehatan

			dan paripurna)															
		S1.3. Meningkatkan Produktivitas SDM masyarakat	Tingkat pengangguran terbuka	4,93% (2017)	4%		3,5%		3%		2,5%		2%		2%			BPS
		P1.3.1. Program peningkatan kualitas dan produktivitas	Jumlah tenaga kerja yang berkualitas (orang)	1.224	225	750.000.000	275	907.500.000	300	1.041.000.000	325	1.186.250.000	375	1.443.750.000	1.500	5.328.500.000	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		M2 : Meningkatkan pendapatan dan meringankan beban hidup masyarakat																
		T2. Meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat	PDRB/kapita	26.746	29,75 juta		32,72 juta		35,75 juta		38,75 juta		40 juta		40 juta			Semua SKPD
			Pertumbuhan ekonomi	7,39%	7,39%		7.54		7.69		7.84		7.99		8.14			Semua SKPD
		S2.1. Meningkatkan produksi dan produktivitas sektor - sektor perekonomian daerah	Kontribusi pertanian tanaman pangan terhadap PDRB	7,56%														Dinas Pertanian
			Kontribusi peternakan terhadap PDRB	8,16%														Dinas Pertanian
			Kontribusi perikanan terhadap PDRB	12,51%														Dinas Perikanan dan Kelautan
		P2.1.1. Program peningkatan produksi hasil peternakan	Jumlah sapi yang dibagikan ke kelompok peternak (ekor)	Data belum tersedia	380	3.800.000.000	1250	125.000.000	1250	125.000.000	1250	125.000.000	1250	125.000.000	53.800.000.000			Dinas Pertanian
		P2.1.2. Program	Jumlah kasus	50	40	500.0	30	400.0	20	300.00	10	250.00	5	200.00	5	1.650.		Dinas

		pengecahan dan penanggulangan penyakit ternak	kematian ternak karena penyakit (ekor)			00.000		00.000		0.000		0.000		0.000		000.000	Pertanian
		P2.1.3. Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	Jumlah sapi yang lahir melalui insiminasi buatan (ekor)	809	191	500.000.000	200	600.000.000	200	600.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	791	2.300.000.000	Dinas Pertanian
		P2.1.4. Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	Jumlah ternak sapi yang dipasarkan ke luar takalar (ekor)	3.950	4.000	110.000.000	4.200	110.000.000	4.400	110.000.000	4.600	110.000.000	4.800	110.000.000	22.000	550.000.000	Dinas Pertanian
		P2.1.5. Program pengembangan biogas berbasis kotoran sapi	Jumlah unit biogas (unit)	Belum tersedia	200	2.000.000.000	200	2.000.000.000	200	2.000.000.000	200	2.000.000.000	200	2.000.000.000	1.000	10.000.000.000	Dinas Pertanian
		P2.1.6. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Jumlah bantuan bibit tanaman produktif (kelapa dalam, dan sukun)	Sukun 3000, kelapa dalam 2000	Sukun 1000, kelapa dalam 1500	Sukun 30.000.000, kelapa dalam 22.500.000	Sukun 2000, kelapa dalam 5000	Sukun 60.000.000, kelapa dalam 75.000.000	Sukun 2000, kelapa dalam 5000	Sukun 60.000.000, kelapa dalam 75.000.000	Sukun 2000, kelapa dalam 5000	Sukun 60.000.000, kelapa dalam 75.000.000	Sukun 2000, kelapa dalam 5000	Sukun 60.000.000, kelapa dalam 75.000.000	Sukun 9000, kelapa dalam 21.500.000	Sukun 270.000, kelapa dalam 322.500.000	Dinas Pertanian
			Jumlah bantuan tanaman tebu (ha)	49	450	11.700.000.000	750	19.500.000.000	300	7.800.000.000	300	7.800.000.000	300	7.800.000.000	2.100	54.600.000.000	Dinas Pertanian
		P2.1.7. Program penangkaran benih	Jumlah unit penangkaran benih (unit)	20	20	900.000	25	1.125.000	30	1.350.000	30	1.350.000	30	1.350.000	135	6.075.000	Dinas Pertanian
		P2.1.8. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, dan jaringan pengairan lainnya	Panjang jaringan irigasi tersier yang direhabilitasi (m)	8000	0	0	1000	1.200.000.000	1000	1.200.000.000	1000	1.200.000.000	1000	1.200.000.000	4.000	4.800.000.000	Dinas Pertanian

				pusaka = 4)	pusaka = 1)	berburu = 500.000.000,)	pusaka = 1)	n berburu = 500.000.000, wisata kota pusaka = 300.000.000)	pusaka = 1)	berburu = 500.000.000, wisata kota pusaka = 300.000.000)	pusaka = 1)	n berburu = 500.000.000, wisata kota pusaka = 300.000.000)	pusaka = 1)	berburu = 500.000.000, wisata kota pusaka = 300.000.000)	pusaka = 4)	n berburu = 2.500.000, wisata kota pusaka = 1.200.000.000)	
		P2. Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	Jumlah pedagang kaki lima dan asongan	500	500	150.000.000	100	175.000.000	100	200.000.000	100	225.000.000	100	250.000.000	900	1.000.000.000	Dinas Perdagangan
		P2.1.12 Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif	Jumlah UKM yang belum dibina	30	10	150.000.000	5	175.000.000	5	200.000.000	5	225.000.000	5	250.000.000	30	1.000.000.000	Dinas Perdagangan
		P2.1.13 Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah	Jumlah wirausaha yang unggul dan kompetitif (Jumlah 68.737 UKM yang belum unggul dan kompetitif)	Data belum tersedia	3.900	487.500.000	4.133	516.625.000	4.582	572.750.000	4.900	612.500.000	5.396	674.500.000	22.911	2.863.875.000	Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		P2.1.14 Program pengembangan system pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah	Jumlah UKM yang belum mendapatkan bantuan usaha	Data belum tersedia	3.900	487.500.000	4.133	516.625.000	4.582	572.750.000	4.900	612.500.000	5.396	674.500.000	22.911	2.863.875.000	Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi

				CO 1.341,52 ambang batas 30.000, timbang 0,0231 ambang batas 2, kebisingan 70,2 ambang batas 60														
			Indeks kualitas tutupan lahan	266.514,1 3 (2017)														
		S4.2 Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan di desa	Persentase desa Swadaya, swakarsa dan swasembada	Swakarya = 92% Swasembada = 8 %	Swasembada 11 %		Swasembada 14 %		Swasembada 17 %		Swasembada 20 %		Swasembada 23 %		Swasembada 23 %		Dinas Pemberdayaan Dana Desa	
		P4.2.1 Peningkatan jumlah Alokasi Dana Desa (ADD)	Persentase peningkatan dana ADD	30.000.00 0.000	61.439.14 3.100	104,8 0%	62.500.0 00.000	1,73 %	63.500.0 00.000	1,60%	64.500. 000.000	1,57%	65.500. 000.000	1,55%	65.500. 000.000	1,55%	BPKAD	
		T5.Meningkatkan kapasitas infrastruktur wilayah secara berkelanjutan																
		S5.1 Meningkatkan kapasitas infrastruktur transportasi	Persentase panjang jaringan jalan kualitas baik															
		P5.1.1 Program pembangunan jalan dan jembatan	Panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	351,97	30,5	99.12 5.000. 000	30,5	99.12 5.000. 000	35,7	119.59 5.000. 000	35,7	119.59 5.000. 000	35,7	119.59 5.000. 000	168,10	565.70 0.000. 000	DPUTR KP	

				Qur'an													
		P6.1.1 Program umrah bagi imam desa, iman dusun dan imam masjid.	Jumlah imam desa, iman dusun dan imam masjid yang berprestasi (orang)	Data belum tersedia	0	0	250	6.250.000.000	250	6.250.000.000	250	6.250.000.000	250	6.250.000.000	1.000	25.000.000.000	Kesra Setda
		P6.1.2 Program peningkatan insentif pembina TK/TPA dan pegawai syara'	Jumlah Pembina TK/TPA dan pegawai syara'														Kesra Setda
		S6.2 Meningkatkan kualitas ketertiban, ketentraman dan perlindungan masyarakat	Persentase gangguan ketertiban dan ketentraman yang tertangani	97,22% (2017)	98%		99%		100%		100%		100%		100%		Satpol PP dan Damkar
			Persentase tingkat waktu tanggap	83% (2017)	85%		88%		90%		95%		100%		100%		Satpol PP dan Damkar
		P6.2.1 Program pengadaan mobil pemadam kebakaran setiap kecamatan	Jumlah mobil pemadam kebakaran (unit)	4	0	0	3	4.500.000.000	3	4.500.000.000	3	4.500.000.000	0	0	9	13.500.000.000	Satpol PP dan Damkar
		P6.2.2 Program penataan administrasi kependudukan berbasis mobil keliling layanan (KTP, KK, Akte Kelahiran)	Jumlah mobil keliling layanan (KTP, KK, Akte Kelahiran)	Data belum tersedia			1	1.500.000.000							1	1.500.000.000	Dinas Admin duk Capil
		M6: Menerapkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, akuntabel dan demokratis															
		T7. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang	Jumlah temuan BPK	43 (2017)	45		35		30		25		20		20		Inspekt orat

